

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peternakan sebagai salah satu sub sektor dalam sektor pertanian merupakan bagian integral dari keberhasilan sektor pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan kualitas gizi masyarakat serta pengembangan ekspor. Adanya perbaikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyat, konsumsi protein hewani diperkirakan akan terus meningkat disamping peluang dan potensi pasar domestik, komoditas peternakan juga mempunyai potensi pasar ekspor. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pembangunan peternakan adalah modal yang cukup.¹

Modal usaha yang diberikan oleh pemerintah melalui program KKP-E ini disalurkan melalui bank BRI yang akhirnya pihak dari usaha peternakan/pertanian mencairkan dananya melalui bank BRI. Modal yang diberikan pemerintah untuk usaha peternakan ini berjumlah 35 juta tiap orang dan kelompok peternakan ini terdiri dari 10 orang. Sistem pengembalian modal usaha yang disalurkan pemerintah dalam program KKP-E ini melalui bank BRI dengan cara diangsur selama 3 tahun.

Kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) merupakan kredit modal kerja atau investasi bagi peternak/petani yang disediakan bank dimulai sejak tahun 2007, ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan permodalan peternak/petani dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya yang dianjurkan. Dalam pelaksanaannya KKP-E terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan ditingkat lapangan dan sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

¹ [http:// Ilmiah.blogspot.peternakan.com](http://Ilmiah.blogspot.peternakan.com). diakses pada tanggal (12 Januari 2017).

KKP-E atau kredit ketahanan pangan dan energi adalah program permodalan dari pemerintah yang bekerja sama dengan bank dengan memberikan pinjaman berupa modal usaha peternakan dan pertanian dengan suku bunga yang rendah. Dimana bunga dari pinjaman ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. KKP-E ini hampir sama dengan KUR kalau KKP-E hanya memberikan permodalan kepada pelaku usaha peternakan, pertanian dan perkebunan. Kalau KUR adalah program pinjaman permodalan untuk digunakan sebagai permodalan berbagai macam usaha.

Syarat bagi peternak dan petani sesuai ketentuan bank di mana para peternak atau petani ingin mengajukan pinjamannya. Biasanya dalam pengajuan KKP-E ini ada persyaratan harus adanya jaminan tambahan berupa barang bergerak seperti BPKB kendaraan atau barang tidak bergerak seperti Sertifikat tanah/bangunan.²

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa “Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat”. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan konsisten. Kebijaksanaan perkreditan harus sudah diterapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1996. Bagi Bank yang telah mempunyai pedoman kebijaksanaan perkreditan wajib menyesuaikan kembali pedoman tersebut dengan memperhatikan semua aspek-aspek tersebut.³

Masyarakat kecil di daerah pedesaan meliputi petani, nelayan, buruh, pedagang, pegawai negeri, pengrajin semuanya kadang-kadang memerlukan

² <http://www.Wiraternak.Com/2015/12.html> diakses pada tanggal (14 September 2016).

³ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 243-244.

pinjaman berupa uang kas untuk berbagai tujuan misalnya untuk persediaan makanan selama masa sebelum panen atau paceklik, pembelian sarana produksi pertanian, biaya perdagangan, biaya penyimpanan.

Lembaga-lembaga kredit yang beroperasi di daerah pedesaan menurut luas daerah operasinya dapat dibagi menjadi dua kelompok.

1. Lembaga-lembaga kredit yang biasanya beroperasi terbatas hanya pada desa tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah BKD (Badan Kredit Desa), Lumbung desa dan koperasi-koperasi serba guna atau koperasi-koperasi kredit (simpan pinjam).
2. Lembaga-lembaga kredit yang daerah kerjanya meliputi beberapa desa dan mungkin meliputi satu kecamatan, kabupaten, misalnya BKK (Badan Kredit Kecamatan), perjan pegadaian, Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor cabang atau perwakilan, unit desa, atau lembaga kredit usaha perorangan. Kredit perorangan ada dua jenis yaitu yang memberikan pinjaman berwujud barang disebut sebagai “*mindring*” dan yang memberikan kredit berwujud uang disebut sebagai pelepas uang. Daerah operasi mereka tak hanya di satu daerah saja, tetapi mungkin meliputi beberapa desa yang dikoordinasinya.

Lembaga-lembaga kredit formal adalah BRI serta beberapa lembaga kecil lokal yang umumnya berkaitan dengan birokrasi setempat, misalnya BKD (Badan Kredit Desa), BKK (Badan Kredit Kecamatan) dan koperasi-koperasi kredit. Sesuai dengan sifat kebutuhan, masyarakat pedesaan memerlukan sumber pembiayaan yang mudah, dan cepat. Permohonan kredit didasarkan pada kriteria standar yaitu modal, jaminan, karakter, serta kemampuan membayar atau mengembalikan pinjaman.⁴

Walaupun semua tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit telah dilakukan secara hati-hati dan telah dilakukan pengawasan dan pembinaan kredit secara berkesinambungan, namun demikian tidak seratus persen kredit

⁴ Faried Wijaya M, dan Soetatwo Hadiwigeno, M.A, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bankperkembangan Teori dan Kebijakan*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 408-409.

akan menjadi lancar. Berbagai faktor yang datanginya dari luar kadang-kadang sulit untuk diprediksi akan terjadi.⁵

Modal adalah uang yang dimasukkan kedalam usaha oleh para pemilik usaha dan dapat dalam bentuk tanah, bangun-bangunan, mesin-mesin atau bahan, mampu dalam bentuk uang tunai itu sendiri. Modal pinjaman jelas adalah uang yang diterima dari suatu sumber luar dengan janji untuk dibayarkan kembali pada suatu tanggal di kemudian hari. Modal ini hampir selalu berbentuk tunai.⁶

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpun dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.⁷

Program KKP-E adalah kredit ketahanan pangan dan energi sebagai modal kerja yang diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Program ini di ambil melalui kelompok. Dalam mengembalikan modal yang dipinjami program KKP-E dapat diangsur. Pemberian kredit pada saat ini telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan. Jenis kredit yang diberikanpun sudah menyesuaikan dengan berbagai jenis usaha yang sering dilaksanakan oleh masyarakat. Fungsi kredit secara umum yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk membantu produksi dan konsumsi rakyat yang juga ditujukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah mendukung perkembangan UMKM terutama dibidang usaha peternakan. Melalui pemberian modal diberikan lewat perbankan, para pemilik usaha di Desa Suwawal kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara mendapatkan bantuan pinjaman modal dari pemerintah, tapi pinjaman modal

⁵Suhardjono, *Manajemen Perkreditan*, Upp, Amp, Ykpn, Yogyakarta, 2003, hlm. 251.

⁶Harold T. Amrine, dkk, *Manajemendan Organisasi Produksi*, Erlangga, Jakarta, 1986, hlm. 489.

⁷Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Salemba Empat, Grand Wijaya, Jakarta, 2006, hlm. 95.

tersebut untuk usaha dibidang peternakan di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sendiri usaha dibidang peternakan lumayan banyak. Perkembangan usaha perternakan cukup bagus, tiap tahun mengalami perkembangan sehingga mampu menopang ekonomi masyarakat di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Tiap usaha peternakan di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mendapat dana pinjaman dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Dana tersebut didapatkan dari pemerintah melalui pengajuan proposal untuk kelompok usaha di bidang peternakan.

Setelah dana cair untuk kelompok usaha peternakan, sebagian dana ada yang tidak digunakan untuk usaha peternakan, tapi untuk usaha lain seperti untuk dagang, meubel, dan lain-lain. Sehingga tingkat pengembalian dana tersebut mengalami hambatan dan kesulitan karena dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena ada sebagian dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan mengakibatkan sebagian besar pengusaha peternakan yang mendapatkan dana tersebut kesulitan dalam pengembalian modal.

Kelompok peternakan Di Desa Suwawal Mlonggo Jepara yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman modal pada tahun 2010-2012 adalah 20% dan pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan hingga 40%, maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Pengembalian Pinjaman Modal Usaha Pada Program KKP-E Di Desa Suwawal Mlonggo Jepara”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan secara lebih spesifik, maka penulis membatasi hanya akan membahas mengenai tingkat kesulitan pengembalian kredit pinjaman modal usaha peternakan pada program KKP-E yang disalurkan pada kelompok Ternak Ayo Maju di desa Suwawal kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan judul yang penulis angkat, Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengembalian pinjaman modal usaha di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengembalian pinjaman modal di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana solusi pengembalian pinjaman modal usaha di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pinjaman modal usaha di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengembalian modal di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
3. Untuk memberikan solusi atau saran kepada anggota program KKP-E yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman modal di Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara praktis dan teoritis.

1. Manfaat praktis
 - a. Dapat membantu memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan yang relevan bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah keilmuan dibidang ilmu pengetahuan ekonomi.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam tulisan skripsi ini secara sistematis. Maka penulis akan memaparkan kerangka pembahasan yaitu:

1. Bagian muka

Dalam bagian ini terdiri dari Halaman judul, Nota persetujuan, Nota pengesahan, Motto, Persembahan, Kata pengantar, Abstrak, Daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari berbagai bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang modal, kredit, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Merupakan hasil dan analisis yang meliputi deskripsi obyek penelitian dan analisis hasil pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

3. Bagian pelengkap

Dalam bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

